

Tinjauan Ideologi Islamisme dalam Terang Gagasan Masyarakat Terbuka Karl Popper

Apolinaris Hendra Asian Jaya Kumpul

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia (hendrakumpul4@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 28 Oktober 2025

Revised: 26 Februari 2026

Accepted: 24 Mei 2026

Available online: 31 Mei 2026

Kata Kunci:

Ideologi islamisme; masyarakat terbuka; Karl Popper; kaum islamis radikal.

Keywords:

Ideology of islamism; open society; Karl Popper; radical islamists.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas ideologi islamisme, gagasan masyarakat terbuka Karl Popper, dan relevansi gagasan masyarakat terbuka Popper bagi kritik terhadap ideologi islamisme. Konsep masyarakat terbuka Popper relevan untuk mengkritisi islamisme karena gagasan tersebut menekankan rasionalitas kritis, keterbukaan, pluralisme, kebebasan, dan penolakan terhadap absolutisme ideologis. Dalam perspektif Popper, masyarakat disebut “terbuka” apabila warga memiliki ruang untuk berpikir kritis, mengoreksi kekuasaan, serta hidup dalam keberagaman tanpa paksaan ideologi tunggal. Sebaliknya, islamisme sering dipandang memiliki kecenderungan menuju

masyarakat tertutup karena disokong oleh beberapa ideologi utama, yakni klaim kebenaran absolut, kategorisasi benar-salah atau skema kawan-lawan, dan konstruksi identitas tertutup. Dalam gagasan masyarakat terbuka, Popper mengkritik setiap ideologi yang mengklaim memiliki kebenaran absolut dan menolak kritik, dialog, serta pluralisme. Gagasan ini relevan untuk mengkritisi islamisme karena islamisme berkecenderungan menjadikan tafsir agama Islam sebagai fundamen utama kehidupan negara dan masyarakat yang mengakibatkan kebebasan berpikir, keberagaman, dan hak individu dibatasi demi mempertahankan tatanan religius yang dianggap absolut. Bagi Popper, masyarakat terbuka merupakan kondisi ideal karena terbuka terhadap kritik, perubahan, perbedaan pandangan, sedangkan sistem yang anti kritik dan memaksakan ideologi tunggal berpotensi melahirkan otoritarianisme. Karena itu, gagasan masyarakat terbuka menjadi kerangka acuan untuk mengkritisi islamisme yang anti-pluralis dan dogmatis tanpa harus menolak Islam sebagai agama. Implikasi dari analisis ini adalah pentingnya menjaga demokrasi, pluralisme, dan sikap kritis agar agama, sistem, dan ideologi tertentu tidak berkembang menjadi radikalisme dan otoritarianisme.

ABSTRACT

This paper describes the ideology of Islamism, Karl Popper's idea of an open society, and the relevance of Popper's idea of an open society to criticism of the ideology of Islamism. Popper's concept of the open society is relevant to the critique of Islamism because it emphasizes critical rationality, openness, pluralism, freedom, and the rejection of ideological absolutism. In Popper's perspective, a society is considered “open” when its citizens have the freedom to think critically, challenge authority, and live within diversity without the imposition of a single ideology. In contrast, Islamism is often viewed as tending toward a closed society because it is supported by several major ideological characteristics, namely claims of absolute truth, binary categorizations of right and wrong friend and enemy, and construction of a closed identity. In his concept of the open society, Popper criticizes every ideology that claims to process absolute truth and rejects criticism, dialogue, and pluralism. This idea is relevant for criticizing Islamism because Islamism tends to position a particular interpretation of Islam as the primary foundation of the state and society, resulting in restrictions

on freedom of thought, diversity, and individual rights in order to preserve a religious order considered absolute. For Popper, the open society represents an ideal condition because it is receptive to criticism, change, and differences of opinion, whereas a system that is resistant to criticism and imposes a single ideology has the potential to give rise to authoritarianism. Therefore, the concept of the open society serves as an important framework for criticizing the anti-pluralist and dogmatic tendencies of Islamism without rejecting Islam as a religion. The implication of this analysis is the importance of safeguarding democracy, pluralism, and critical thinking so that religion, social systems, and particular ideologies do not develop into radicalism and authoritarianism.

PENDAHULUAN

Ideologi islamisme muncul sebagai upaya perlawanan terhadap sekularisasi, modernisasi, dan westernisasi peradaban Barat yang dianggap telah meminimalkan dan menghapus peran agama (Islam) dalam ruang publik. Ideologi islamisme meyakini modernitas peradaban Barat menjadi representasi aksi kaum jahiliyah (kafir). Karena itu, modernitas yang disertai sekularisasi mesti diberantas. Keduanya telah menyeleweng dari jalan Allah, merusakkan moral umat Islam, dan mencederai ajaran-ajaran Nabi Muhammad S.A.W yang tertuang dalam Al-Quran. Karena itu, tujuan dari ideologi islamisme adalah mengusung program kontra modernitas yang didasarkan pada hukum Islam serta ingin menggantikan tatanan peradaban Barat yang sekular dengan mendirikan sistem negara yang berbentuk khilafah yang didasarkan pada syariat Islam (Daven, 2013: 209).

Ideologi Islamisme dicirikan oleh beberapa pemikiran, yakni klaim kebenaran absolut, kategorisasi benar-salah atau skema kawan-lawan, anti-modernitas, dan mengkonstruksi identitas tertutup. Berpijak pada pemikiran ideologis ini, kaum islamis radikal berkeinginan untuk mendirikan negara Islam yang berbentuk khilafah dengan syariat (hukum) Islam sebagai dasar negara. Mereka ingin menggantikan tatanan peradaban Barat yang dinilai sekular. Karena itu, kaum Islamis radikal sering kali menggunakan medium kekerasan dan bahkan pembunuhan untuk melawan peradaban Barat. Bagi mereka, pembunuhan demi memusnahkan keberadaan kelompok yang dianggap kafir yang direpresentasi peradaban Barat merupakan sebuah upaya menegakkan kedaulatan Allah. Karena itu, banyak aksi kekerasan dan pembunuhan yang didalangi ideologi islamisme seperti pengeboman *World Trade Center* (WTC) di New York pada 11 September 2001, pengeboman terhadap konsulat Amerika Serikat di Riyadh, dan beberapa aksi di Indonesia seperti pengeboman Hotel J.W. Marriot di Jakarta pada 5 Agustus 2003, pengeboman di Bali pada 11 Oktober 2002 (Bom Bali I) dan 5 Oktober 2005 (Bom Bali II), serta berbagai aksi nonhumanis lainnya.

Kemunculan ideologi islamisme dipelopori oleh Hassan al-Bana dan Sayyid Qutb, dua tokoh Islam Mesir. Keduanya berusaha mengakhiri hegemoni sekular peradaban Barat di Mesir dan seluruh wilayah peradaban Islam. Pada tahun 1928, Hassan al-Bana mendirikan organisasi radikal *Ikhwanul Muslimin*. Organisasi ini menjadi wadah perlawanan untuk melenyapkan hegemoni sekularisasi peradaban Barat di Mesir (Ibrahim, 1996: 99). Menurut Hassan al-Bana, modernitas peradaban Barat telah menghancurkan moral rakyat Mesir, khususnya para perempuan. Karena itu,

Ikhwanul Muslimin melakukan pengontrolan ketat terhadap prostitusi, perjudian, alkohol, hiburan malam, dan pembatasan gerak perempuan di ruang publik.

Di bawah pimpinan Sayyid Qutb, *Ikhwanul Muslimin* bertransformasi menjadi organisasi militan-radikal yang melegalkan kekerasan untuk melawan sistem Pemerintahan Mesir di bawah pimpinan Gamal Abdel Nasser yang dianggap menjadi representasi tatanan sekular peradaban Barat. Bagi Qutb, kekerasan dilegalkan karena Nasser dan sekularitas peradaban Barat telah merongrong kedaulatan Allah (Ibrahim, 1996: 101). Namun, rezim Nasser berhasil menumpas perlawanan Sayyid Qutb sehingga banyak anggota *Ikhwanul Muslimin* melarikan diri ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerima kedatangan anggota *Ikhwanul Muslimin* dengan baik. Mereka direkrut untuk menyebarkan paham Wahabisme ke seluruh dunia. Wahabisme merupakan paham yang melakukan pembacaan secara harfiah, ekstrem, dan kaku terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Wahabisme menolak rasionalisme dan berbagai khazanah intelektual Islam. Wahabisme memproklamkan *jihad* kepada kaum muslim dan non-muslim yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan melakukan pembunuhan dan siksaan yang kejam karena dianggap *syirk* (politeis), kafir, dan murtad (Wahid, 2009: 64-70).

Istilah islamisme sering kali disamakan dengan fundamentalisme Islam. Namun, pada hakikatnya kedua istilah ini berbeda. Kedua istilah ini bahkan menimbulkan perdebatan dalam lingkungan cendekiawan Islam. Bassam Tibi (2012: 30), seorang cendekiawan Islam terkemuka, berpendapat bahwa Islamisme merupakan istilah yang lebih sinkron digunakan dibandingkan fundamentalisme Islam karena bertalian langsung dengan usaha mentransformasi Islam menjadi sebuah ideologi dan gerakan politik, sedangkan istilah fundamentalisme disinyalir mengimitasi gerakan fundamentalisme Kristen di Amerika Utara. Namun, pemikir Islam lain seperti Sad Eddin Ibrahim (1996: 53) menganggap istilah fundamentalisme Islam lebih tepat digunakan dibandingkan islamisme karena istilah fundamentalisme Islam menekankan upaya golongan Islam radikal untuk kembali secara total kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai pedoman utama dalam kehidupan masyarakat.

Dalam keseluruhan tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah islamisme seturut pemahaman Bassam Tibi. Istilah islamisme dipandang bersinggungan langsung dengan usaha mengubah Islam menjadi sebuah ideologi politik yang didasarkan pada pemahaman akan ajaran Islam, baik yang berasal dari Al-Quran, Sunnah Nabi, maupun dari tokoh tertentu. Bassam Tibi (2012: 30) menjelaskan Islamisme demikian "*Islamism is about political order, not faith. Nonetheless, is not more politic but religionized politics.*" Definisi islamisme menurut Bassam Tibi digunakan karena secara tegas membedakan Islam sebagai agama dan islamisme sebagai ideologi politik. Bassam Tibi menjelaskan islamisme secara akademis dan kontekstual untuk mengkritisi dimensi dogmatis, politik, dan antipluralisme dalam islamisme tanpa menolak Islam sebagai sebuah agama dibandingkan istilah fundamentalisme Islam atau radikalisme Islam yang bersifat umum dan ambigu.

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau, mengkaji, dan membedah keberadaan serta penyebaran ideologi islamisme dari perspektif masyarakat terbuka yang bagi penulis direpresentasi oleh gagasan masyarakat terbuka Karl Popper. Ideologi islamisme mesti ditinjau dari perspektif masyarakat terbuka Karl Popper karena

gagasan ini menekankan pluralisme, dialog, dan keterbukaan terhadap kritik. Islamisme yang mengklaim kebenaran absolut dan menjadikan tafsir terhadap Islam sebagai fundamen utama dalam kehidupan sosial-politik berpotensi membatasi keberagaman dan hak individu. Jika tidak dikritisi, ideologi islamisme dapat berkembang menjadi sikap dogmatis, anti-pluralis, intoleran, dan bahkan melahirkan otoritarianisme dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, gagasan masyarakat terbuka Karl Popper hadir sebagai antitesis terhadap ideologi islamisme. Ia hadir sebagai antitesis karena masyarakat terbuka mengutamakan pluralisme, kebebasan, rasionalitas kritis, dan keterbukaan terhadap dialog, sedangkan ideologi islamisme menekankan kebenaran absolut dan konstruksi identitas tertutup yang sulit dikritik. Bagi Popper, masyarakat terbuka merupakan kondisi masyarakat ideal karena memberi ruang bagi perbedaan dan kritik terhadap kekuasaan dan ideologi, sementara islamisme yang mengutamakan satu kebenaran tunggal berpotensi melahirkan masyarakat tertutup, intoleransi, dan otoritarianisme.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan mengolah data primer dan sekunder yang berasal dari buku dan jurnal yang relevan dengan tema tulisan. Data primer didapatkan dari tulisan Karl Popper tentang *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya* (2002) serta tulisan Bassam Tibi tentang Islamisme dalam bukunya *Islam between Cultures and Politics* (2001) dan buku *Islamism and Islam* (2012). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai buku dan tulisan ilmiah mengenai pemikiran masyarakat terbuka Karl Popper dan ideologi islamisme baik yang ditulis oleh Karl Popper dan Bassam Tibi sendiri dalam buku-buku mereka yang lain serta berbagai tulisan dan analisis yang dilakukan oleh penulis lain terkait masyarakat terbuka dan ideologi islamisme. Metode ini tentu memiliki keterbatasan, terutama bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa hasil penelitian ini lebih bertumpu pada penafsiran penulis terhadap data kepustakaan sehingga bersifat subjektif dan tidak dapat digeneralisasi secara luas.

PENGERTIAN ISLAMISME

Bassam Tibi (2012: 7) menyatakan bahwa islamisme pada hakikatnya merupakan sebuah ideologi. Penambahan sufiks “-isme” pada kata islamisme mengindikasikan transformasi Islam sebagai agama menjadi sebuah ideologi, seperti ideologi sekular lainnya (marxisme, liberalisme, dan kapitalisme). Islamisme, lanjut Bassam Tibi, mengartikulasikan Islam sebagai sistem politik, sebuah sistem yang tidak sejalan dengan keyakinan islam. Karena itu, bagi Bassam Tibi, islamisme bertumbuh dari penafsiran yang keliru, eksklusif, dan semena-mena terhadap ajaran Islam.

Para pemikir Islam lainnya memiliki pemahaman tersendiri mengenai pengertian islamisme. Mozaffari mendefinisikan islamisme sebagai ideologi yang didasarkan pada tafsir totalitarian atas Islam yang bertujuan untuk menaklukkan dunia dengan cara apa pun (Priyono, 2019: 11). Selanjutnya, Asef Bayat mengartikan islamisme sebagai ideologi dan gerakan yang memperjuangkan berdirinya tatanan

Islam yang berupa negara Islam, hukum Islam, dan kode moral syariah (Priyono, 2019). Kemudian Yilmaz menyatakan islamisme merupakan sebuah istilah yang merujuk pada islam politik, ideologisasi agama, dan penggunaan instrumental Islam dalam politik (Priyono, 2019: 12). Sementara itu, Oliver Roy (2002: 58) mengatakan bahwa islamisme merupakan cabang dari fundamentalisme modern yang ingin mewujudkan negara Islam. Senada dengan ini, Hassan al-Turabi, intelektual Islam Sudan, beranggapan bahwa islamisme merupakan ideologi yang berkeinginan menjadikan Islam sebagai konstitusi dan hukum yang diyakini bisa memberikan solusi atas semua persoalan dalam kehidupan manusia (Priyono, 2019: 12).

Bassam Tibi (2001: 15) menjelaskan bahwa ada garis demarkasi yang jelas antara Islam dan islamisme. Bagi Bassam Tibi, Islam dipahami sebagai sebuah agama dan sistem budaya, sedangkan islamisme merupakan sebuah produk yang muncul dari perbenturan Islam dengan kultur modernitas. Selanjutnya, Bassam Tibi (2001: 13) menjelaskan islamisme seperti kutipan ini *“Islamism is both a response to the ongoing political crisis of the modern secular nation-state in the world of islam and an indication of the defensive culture.”* Hal ini berarti islamisme hadir untuk merespons krisis politik yang dihadapi oleh negara sekular modern yang berbudaya Islam.

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh di atas, islamisme dapat disintesis sebagai sebuah ideologi politik yang lahir dari ideologisasi Islam serta berupaya menjadikan tafsir kaum tertentu atas Islam sebagai dasar negara, hukum, dan tatanan sosial. Dalam hal ini, ada garis demarkasi yang mencolok antara Islam dan islamisme. Islam merupakan agama dan sistem budaya, sementara itu islamisme berada dalam ranah politik dengan tujuan membangun negara Islam, menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara dan tatanan sosial, serta menjadikan agama Islam sebagai solusi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, islamisme dipandang sebagai ideologi dan gerakan yang menafsirkan Islam secara eksklusif, dogmatis, dan antipluralis.

Secara konkret perbedaan keduanya dapat dilihat pada cara pandang hubungan antara agama dan negara. Islam sebagai agama mengajarkan nilai iman, moral, dan spiritual yang dihayati secara personal maupun kelompok, sedangkan islamisme menjadikan Islam sebagai ideologi politik yang berusaha mengubah ideologi dan dasar negara secara formal yang didasarkan pada syariat dan sistem khalifah. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim dapat menjalankan ibadah serta menghayati nilai-nilai iman, moral, dan spiritual dalam Islam dengan baik dan bebas tanpa harus mengubah Islam menjadi dasar negara. Sebaliknya, kelompok islamisme menuntut penerapan hukum syariat Islam diberlakukan bagi semua warga negara dan menganggap sistem khalifah sebagai sistem terbaik dari sebuah negara serta menolak sistem politik sekular atau pluralis yang dianggap tidak sesuai dengan Islam. Dengan demikian, Islam berfokus pada ajaran agama dan kehidupan iman, sedangkan islamisme mengutamakan proyek politik dan ideologisasi agama Islam menurut tafsiran yang eksklusif.

PEMIKIRAN IDEOLOGIS DALAM ISLAMISME

Islamisme sebagai Antimodernitas yang Modern

Jürgen Habermas menyatakan bahwa modernitas memiliki tiga premis utama (Hardiman, 2008: 162). Pertama, modernitas mengutamakan kesadaran diri sebagai subjek yang menaruh perhatian pada hak-hak asasi manusia, fungsi ilmu pengetahuan, otonomi pribadi dan demokrasi. Kedua, modernitas mengkritik tradisi-tradisi dalam kehidupan masyarakat yang dinilai membelenggu eksistensi manusia sebagai pribadi yang bebas. Ketiga, modernitas bersifat progresif yang berarti modernitas melakukan pembaruan terhadap tradisi melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendirikan organisasi dan lembaga sosial modern. Secara implisit, ketiga premis modernitas ini menyebabkan adanya sekularisasi. Sekularisasi ditandai oleh tiga hal, yakni pertama, pemisahan antara pemerintah dan ideologi-ideologi keagamaan dan struktur agama; kedua, ekspansi pemerintah untuk mengatur kehidupan sosio-ekonomis yang sebelumnya diatur oleh struktur-struktur keagamaan; ketiga, transvaluasi budaya politik dengan tujuan mengembangkan nilai-nilai politik sekular yang bebas dari pengaruh agama (Smith, 1985: 115).

Islamisme merupakan sebuah ideologi modern yang muncul untuk merespons dan meresistensi modernitas. Kaum Islamis radikal menganggap modernitas peradaban Barat yang memboncengi sekularisasi bisa memengaruhi dan mentransformasi cara hidup umat Islam sehingga mereka berbalik dari jalan Allah (Smith, 1985: 15). Selain itu, Karen Armstrong (2002: xi-xii) mengungkapkan bahwa islamisme menganggap modernitas Barat akan mereduksi dan mendegradasi hal-hal yang bersifat sakral dalam kehidupan umat Islam. Armstrong (2002: xiii) juga berpendapat bahwa resistensi islamisme terhadap modernitas Barat bukan hanya dipahami sebagai pertarungan politik biasa, tetapi juga peperangan kosmis antara kebaikan melawan kejahatan. Dalam hal ini, Armstrong merujuk pada kemunculan awal ideologi islamisme di negara-negara Jazirah Arab sebagai bentuk resistensi terhadap kolonialisme Inggris dan Perancis. Hal ini juga bisa terlihat dari perjuangan Al-Bana, pendiri *Ikhwanul Muslimin*, untuk menggulingkan kekuasaan Inggris di Mesir termasuk pemerintahan Mesir yang pro Inggris. Al-Bana berpersepsi bahwa Islam merupakan iman dan ritual, agama dan negara, spiritualitas dan amal, Al-Quran dan pedang. Beranjak dari persepsi ini, Al-Bana mengatasnamakan Islam dalam perjuangannya membebaskan Mesir dari belenggu sekularitas peradaban Barat (Rohmanu, 2015: 44).

Perjuangan serupa dilakukan oleh Al-Mawdudi, tokoh perjuangan islamisme di India. Al-Mawdudi menggunakan organisasi *Jama'at al-Islam* yang didirikannya untuk melawan modernitas yang dipersepsikannya sebagai budaya kelompok yang dianggap kafir. Karena itu, Al-Mawdudi sangat aktif memperjuangkan pendirian negara Islam bagi umat Islam India dengan aksi *jihad* (Rohmanu, 2015: 45). Selain itu, Al-Mawdudi menolak ide kelompok Islam moderat untuk menyatukan syariat Islam dengan modernitas melalui *ijtihad*. *Ijtihad* merupakan usaha yang dilakukan oleh para ahli Islam dan pemuka agama Islam untuk mengkaji masalah keislaman dengan tilikan rasionalitas yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits (Tule, 2008: 157).

Resistensi para penganut ideologi islamisme terhadap peradaban Barat bisa juga ditilik dalam uraian Samuel Huntington, *The Clash of Civilizations*. Menurut

Huntington (1996: 4), peradaban Barat, Islam, dan Konfusianisme akan bertentangan satu sama lain, sehingga dunia pun akan hancur karena peperangan ketiga agama tersebut. Benturan paling dahsyat, lanjut Huntington, ialah pertentangan antara Barat dan Islam. Hal ini terjadi karena kaum islamisme berpersepsi bahwa peradaban Barat yang mengagungkan rasionalitas akan menghancurkan kepercayaan umat Islam pada kedaulatan Allah. Karena itu, bagi Huntington, kaum islamis radikal meresistensi peradaban Barat secara besar-besaran bahkan dengan kekerasan dan pembunuhan yang mereka akui sebagai bentuk dari *jihad*. Persepsi dan ramalan Huntington ini menjadi kenyataan setelah 5 tahun penerbitan bukunya. Pada 2001, kaum islamis radikal melakukan pengeboman terhadap *World Trade Center* (WTC) yang mereka akui sebagai bukti nyata keberadaan modernitas peradaban Barat. Sementara itu, Huntington menyatakan Barat kerap kali menuding kaum islamis radikal sebagai biang keladi berbagai aksi terorisme yang terjadi di dunia.

Sebenarnya Barat kurang menyadari bahwa kaum islamis radikal meresistensi peradaban Barat dengan cara modern. Hal ini terjadi karena fenomena islamisme bertumbuh dan berkembang dalam era modern. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tanpa adanya modernitas, islamisme mungkin tidak akan ada karena islamisme ada untuk meresistensi modernitas peradaban Barat (Daven, 2019: 102). Aksi kaum islamis radikal berbeda dengan kaum islamis konservatif. Kaum Islamis konservatif berjuang menghidupkan kembali ajaran-ajaran dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad S.A.W, dan syariat Islam tanpa melakukan perlawanan terhadap modernitas Barat dan menutup diri secara total terhadap apapun yang berbau modernitas. Kaum islamis radikal bersikap sebaliknya. Mereka melawan modernitas Barat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan modern dan teknologi modern untuk mengaktualisasikan syariat Islam (Daven, 2019: 103). Kaum islamis radikal terbuka pada pengetahuan modern untuk membedah modernitas dan menggunakan teknologi modern seperti berbagai perlengkapan senjata modern untuk membinasakan peradaban Barat.

Dengan demikian, islamisme menggunakan cara-cara modern untuk meresistensi modernitas karena islamisme lahir dalam konteks dunia modern dan memanfaatkan instrumen modern untuk membangun dan menyebarkan pengaruh politiknya. Islamisme memang menolak nilai-nilai modernitas seperti liberalisme, sekularisme, dan pluralisme, tetapi gerakan islamisme kerap kali menggunakan teknologi, media massa, internet, organisasi politik modern, pendidikan, bahkan sistem demokrasi untuk mencapai tujuan ideologisnya. Misalnya, kelompok islamisme menggunakan YouTube dan berbagai platform media sosial untuk dakwah politik dan propaganda ideologi mereka, pembentukan partai politik Islam seturut sistem demokrasi modern untuk memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara, serta pendidikan modern melalui dakwah kampus, penerbitan buku dan jaringan internasional untuk menyebarkan ideologi islamisme. Dalam hal ini, Oliver Roy (2006: 1-25) menjelaskan bahwa islamisme bukan semata-mata penolakan terhadap modernitas, melainkan juga produk dari modernitas itu sendiri.

Dalam banyak hal, kondisi tersebut dipandang sebagai kontradiksi, karena di satu sisi islamisme menolak modernitas, tetapi di sisi lain memanfaatkan produk-produk modernitas seperti teknologi, media digital, organisasi modern, serta pendidikan modern dalam menyebarkan ideologi. Kontradiksi ini sebenarnya

menunjukkan bahwa islamisme tidak menolak modernitas secara total, melainkan menolaknya secara selektif terhadap aspek-aspek tertentu dari modernitas yang dianggap bertentangan dengan identitas atau nilai Islam yang mereka tafsir secara eksklusif. Dengan kata lain, islamisme menerima modernitas pada level instrumen dan strategi politik serta menolak modernitas pada level nilai dan budaya. Karena itu, islamisme sering kali disebut sebagai gerakan yang antimodernitas tetapi modern dalam metode.

Klaim Kebenaran Absolut

Perjuangan kaum Islamis radikal didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki kebenaran absolut yang berasal dari Allah. Dalam keyakinan mereka, Allah telah memberikan legitimasi sepenuhnya kepada mereka untuk mengimplementasikan kebenaran absolut tersebut dengan cara apapun, termasuk kekerasan dan pembunuhan. Pemahaman ini sebenarnya telah dianut dan dipraktikkan selama berabad-abad sejak adanya agama Islam, namun pemahaman ini kemudian dirumuskan secara lebih sistematis dalam pemikiran dan ajaran Sayyid Qutb, tokoh awal pergerakan islamisme.

Sayyid Qutb mengkonstruksi paradigma kebenaran absolut melalui pemikirannya tentang *takfiri* (pengkafiran) yang didasarkan pada *Surat Al Ma'idah 44* yang berbunyi "barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir." Sayyid Qutb memahami surat ini sebagai sebuah imperatif dari Allah kepada umat Islam. Allah merestui umat Islam untuk menerima dan menjalankan hukum Allah. Orang-orang non-Islam, tandas Sayyid Qutb, tidak mendapatkan keistimewaan seperti mereka. Karena itu, mereka dianggap sesat, murtad dan kafir. Sayyid Qutb kemudian memandang umat Islam yang tidak menjalankan hukum Allah sebagai kaum kafir, sebab hukum yang berasal dari Allah itu suci (Iqbal dan H. Nasution, 2015: 36).

Selanjutnya sebagai pengembangan dari paradigma di atas, Sayyid Qutb menjadikan *hakimiyah* sebagai pokok iman. *Hakimiyah* merupakan suatu pemahaman yang meyakini bahwa hanya hukum Allah yang pantas diterapkan kepada semua umat manusia di dunia (Iqbal dan H. Nasution, 2015: 37). Basis legitimasi yang dipakai oleh Sayyid Qutb ialah firman Allah dalam *Surat Al Maaidah 44* seperti kutipan pada paragraf di atas. Berkaca pada *Surat Al Maaidah 44* ini, Sayyid Qutb (2019: 214) menegaskan secara berulang-ulang *hakimiyah* adalah bagian yang paling fundamental dalam sifat-sifat Ketuhanan. Persepsi Sayyid Qutb ini sebenarnya mendiskreditkan sifat ke-Esa-an Tuhan yang merupakan hakikat utama dari Tuhan. Namun, Sayyid Qutb dan para pengikutnya tetap bersikeras untuk mengkafirkan mereka yang tidak menjalankan hukum Allah seperti yang tertera dalam Al-Quran. Sayyid Qutb (2019) menolak semua hukum pidana dan perdata yang berlaku di Mesir karena dibuat oleh manusia. Hukum ini tidak selaras dengan Hukum Allah dalam Al-Quran. Tentang hal ini, Sayyid Qutb (2019) secara spesifik menulis demikian:

Orang-orang yang tidak mengesahkan Allah Ta'ala dengan *hakimiyah*, kapan pun dan di mana pun, maka mereka adalah orang-orang musyrik. ...Sesungguhnya manusia itu hanya dianggap Muslim ketika mereka menyempurnakan mata rantai keislaman, yaitu menggabungkan keimanan dan syair dengan tauhid *hakimiyah* dan menolak mengakui

hukum-hukum, undang-undang, peraturan, norma, atau tradisi, yang tidak bersumber dari Allah. Nah, hanya yang demikian inilah yang disebut Islam itu. (Qutb, 2019).

Selain itu, klaim absolut islamisme yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb terdapat pula dalam pemikirannya tentang *rabbaniyah* (ketuhanan). *Rabbaniyah* merupakan konsep yang menyatakan bahwa manusia hanya menerima, memahami, dan menerapkan ajaran Allah dalam Al-Quran sebagai suatu ajaran murni tanpa perlu interpretasi dan mengintervensinya dengan ajaran lain teristimewa ajaran manusia yang tertuang dalam buku-buku dan hukum-hukum moral (Qutb, 2019: 215). Menurut Qutb, *rabbaniyah* merupakan konsep utama dan pertama yang menjadi sumber pengajaran dan praktik hidup kaum Islam. Dengan demikian, menurut Qutb, manusia yang membuat hukum dan aturan berdasarkan interpretasi terhadap realitas merupakan kelompok orang yang dianggap sesat dan kafir yang ingin melawan Hukum Allah (Iqbal dan Husein Nasution, 2015: 206-207).

Sayyid Qutb berpandangan bahwa hanya para penganut dan pejuang ideologi islamisme saja yang mengimplementasikan *rabbaniyah* (Bassam Tibi, 2001). Sementara itu, umat Islam yang lain dan (apalagi) para penganut agama-agama lain dinilai telah sesat dan dianggap kafir karena tidak mengimplementasikan konsep *rabbaniyah* dalam realitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, bagi Sayyid Qutb (2019), penerapan dan pelaksanaan pandangan dan pikiran nilai-nilai moral dan religius yang disusun manusia sering kali keliru dan terjebak dalam kekeliruan karena manusia adalah makhluk berdosa.

Dengan demikian, konsep *rabbaniyah* Sayyid Qutb menegaskan bahwa kedaulatan mutlak hanya dimiliki Allah, sehingga semua aspek kehidupan manusia mesti tunduk dan patuh pada hukum Allah. Manusia tidak mempunyai otoritas untuk membuat sistem hukum dan nilai karena akan bertentangan dengan otoritas Allah. Menurutnya, campur tangan manusia dalam membuat dan menentukan hukum atau tatanan nilai dipandang sebagai sesuatu yang kafir karena manusia mengambil alih hak Allah dalam menentukan aturan dan nilai-nilai kehidupan. Konsep *rabbaniyah* ini pada akhirnya memandang hukum Allah bersifat absolut, sehingga manusia hanya berperan dalam menerima dan melaksanakannya bukan menafsirkannya ulang sesuai dengan konteks sosial-politik modern. Karena itu, Sayyid Qutb sebenarnya menolak peran akal budi manusia dalam menginterpretasi dan menyelaraskan ajaran Allah dalam konteks masyarakat modern.

Dalam konteks masyarakat plural, pandangan Sayyid Qutb sangat problematis. Ia menutup kemungkinan terhadap ruang dialog, kritik, dan pluralisme interpretasi. Ketika suatu interpretasi dianggap sangat identik dengan kehendak Allah, maka kritik terhadap tafsiran tersebut dianggap sebagai penolakan terhadap wahyu Ilahi yang dialirkan melalui agama serta menutup kemungkinan terhadap tafsiran-tafsiran lain yang sebenarnya mungkin lebih relevan dengan kebenaran wahyu Ilahi. Kondisi ini menciptakan sikap dogmatis, otoritarian, dan eksklusif dalam kehidupan sosial dan politik.

Kategorisasi “Benar-Salah” atau Skema “Kawan-Lawan”

Kategorisasi “benar-salah” atau skema “kawan-lawan” dalam ideologi islamisme bersifat politis. Hal ini bersumber pada paradigma mereka yang memandang dunia sebagai pertarungan antara kubu *umma* (kaum muslim/beriman) berhadapan dengan jahilliah (kelompok yang dianggap kafir) (Daven, 2019: 124). Islamisme melihat kelompok yang dianggap kafir sebagai representasi kekuatan jahat. Karena itu, islamisme ingin memusnahkan kelompok yang dianggap kafir dan dipandang menjelma dalam modernitas peradaban Barat yang sekular. Islamisme pun ingin mendirikan negara berbentuk khilafah dengan jihad sebagai sarana perjuangan sebagai antitesis peradaban Barat yang jahilliah (Daven, 2019).

Impaknya, ideologi islamisme secara sepihak membagi manusia ke dalam kategori benar dan salah. Umat Islam yang menganut ideologi islamisme dikategorikan sebagai orang-orang benar karena mereka melaksanakan Hukum Allah dengan baik dan konsekuen, sedangkan orang-orang di luar mereka dianggap sebagai orang-orang yang sesat dan salah karena tidak mengimplementasikan Hukum Allah dengan murni dan percaya pada hukum buatan manusia yang banyak sesat dan keliru (Iqbal dan H. Nasution, 2015:199).

Dalam hubungannya dengan tatanan pemerintahan, islamisme menegaskan bentuk negara yang benar adalah khilafah, sedangkan bentuk pemerintahan yang salah adalah model tatanan pemerintahan Barat. Penganut ideologi islamisme menyatakan bahwa masyarakat dan gerakan yang ingin menjadikan khilafah sebagai bentuk negara dianggap sebagai kawan, sedangkan bentuk pemerintahan Barat dan negara-negara yang mengadopsinya dilihat sebagai lawan yang mesti dimusnahkan. Ideologi islamisme meyakini bentuk pemerintahan khilafah berasal dari Tuhan dan dianggap sebagai sistem yang paling benar dan sempurna dari semua sistem kenegaraan yang pernah ada di muka bumi. Sayyid Qutb mengafirmasi bentuk pemerintahan khilafah sebagai pemerintahan kedaulatan Tuhan, seperti yang ditegaskannya dalam kutipan berikut:

Bentuk pemerintah yang ideal adalah suatu negara yang berdasarkan atas kedaulatan Hukum Ilahi. Sistem pemerintahan di dunia ini harus berdasarkan penghambaan diri manusia pada Tuhan saja. Kemudian, di bawah sistem umum ini setiap individu boleh memilih akidah yang dianutnya. Dengan begitu, setiap agama telah menjadi milik Tuhan dalam arti perasaan agama itu, kepatuhan, ketundukan, dan peribadatan semua agama itu hanya bagi Allah saja (Qutb, 2001: 72).

Ideologi islamisme menolak sistem kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dalam sistem pemerintahan peradaban Barat karena sistem ini hanya mengakui rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan Tuhan (Iqbal dan H. Nasution, 2015). Ideologi islamisme beranggapan bahwa manusia hanyalah pelaksana kedaulatan dan hukum Allah (Qutb, 2001). Oleh karena itu, ideologi islamisme beranggapan bahwa bentuk pemerintahan kedaulatan yang diakui dan diterapkan oleh peradaban Barat mesti dimusnahkan dan diganti dengan sistem pemerintahan khilafah yang mengakui kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi.

Contoh konkret dari penolakan kedaulatan rakyat oleh kelompok islamisme dilakukan secara getol oleh kelompok Hizb ut-Tahir. Hizb ut-Tahir, kelompok

islamisme yang didirikan oleh al-Nabhani pada 1953 di Yerusalem, menolak kedaulatan rakyat karena beranggapan bahwa demokrasi memosisikan manusia sebagai pembuat hukum, sementara itu mereka berkeyakinan bahwa kedaulatan mutlak hanya dimiliki Allah. Hizb ut-Tahir membedakan konsep “otoritas rakyat” dan “kedaulatan rakyat”, yakni rakyat bisa memilih pemimpin, tetapi rakyat tidak bisa membuat hukum sendiri karena hukum dianggap sudah ada dalam syariat Islam. Akibatnya, demokrasi dianggap bertentangan dengan islam. Karena itu, Hizb ut Tahir menolak sistem parlemen demokratis yang membuat undang-undang berdasarkan suara mayoritas serta memperjuangkan sistem khalifah global yang didasarkan pada syariat Islam (Rashad Ali, 2024: 1-5).

Karena itu, kategorisasi benar-salah dan skema kawan-lawan dalam ideologi islamisme membentuk cara pandang sosial yang biner karena dunia dipahami sebagai pertarungan antara kelompok yang dipersepsi mewakili kebenaran Allah dan kelompok yang dipersepsi melawan kehendak Allah. Hal ini mengakibatkan hubungan antara kelompok islamisme dengan kelompok sosial lain bersifat eksklusif dan konfliktual. Kelompok yang selaras serta mengikuti ideologi islamisme ditempatkan sebagai “kawan” dan menjadi bagian dari komunitas yang benar. Sementara itu, kelompok yang berbeda pandangan, seperti kelompok non-Muslim, Muslim moderat, pemerintah sekular, serta pendukung demokrasi dan liberalisme dianggap sebagai lawan dan musuh bersama karena mereka menjadi bagian dari komunitas yang salah. Kelompok lawan ini menjadi ancaman moral dan religius bagi kelompok islamisme, sehingga dialog, kritik, dan kompromi tidak diterima. Mereka harus dimusnahkan dan dibinasakan, bahkan melalui kekerasan dan pembunuhan. Tindakan ini dianggap bagian dari jihad dan dianggap direstui Tuhan. Dengan demikian, pola pikir seperti ini mengakibatkan adanya intoleransi, polarisasi masyarakat, segregasi sosial, serta kekerasan, pembunuhan terhadap kelompok lain dalam masyarakat.

Mengkonstruksi Identitas Tertutup

Ideologi islamisme mempertahankan identitas Islam berdasarkan versi mereka sendiri yang oleh Thomas Meyer disebut sebagai *identitätswahn* (mania identitas). Istilah ini merujuk pada suatu cara hidup yang memisahkan diri secara total dari kelompok lain yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda dengan mereka (Daven, 2019: 127). Dengan kata lain, ideologi islamisme menolak pluralitas agama dan budaya. Karena itu, ideologi islamisme berciri eksklusif.

Ketertutupan ideologi islamisme mencerminkan aksi puritanisme agama. Puritanisme agama bertujuan memurnikan agama dari pengaruh luar agar orisinalitas ajaran tetap dipertahankan. Impaknya, puritanisme menolak kontekstualisasi ajaran agama dalam bentuk apapun. Islam puritan memosisikan Islam sebagai kerangka normatif ajaran yang transenden, baku, kaku, dan tak berubah. Hukum, ajaran, dan cara hidup umat Islam mesti didasarkan pada apa yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W yang telah diimplementasikan di Mekkah dan Madinah sebagai tempat lahir dan berkembangnya Islam pertama kali. Implementasi tersebut bebas dari historisasi ajaran karena Al-Quran bersifat transenden (Farida, 2015: 149).

Paham puritanisme Islam digaungkan kembali oleh kaum Wahabi. Menurut kaum Wahabi, praktik beragama Islam yang dijalankan oleh umat Islam telah

menyimpang dan mengalami pergeseran dari praktik beragama yang diajarkan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya pada masa awal ke-Islaman. Karena itu, kaum Wahabi menyerukan agar praktik keagamaan Islam kembali kepada ortodoksi syariat yang akan memurnikan Islam sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah (Farida, 2015).

Ada tiga hal yang dilakukan oleh kaum Wahabi untuk menjalankan puritanisme Islam (Kasdi, 2002: 21). Pertama, kaum Wahabi cenderung melakukan interpretasi secara literer terhadap teks-teks Al-Quran. Kaum Wahabi menolak pemahaman kontekstual atas teks Al-Quran karena diklaim mereduksi kesucian Al-Quran. Kedua, kaum Wahabi menolak pluralisme dan relativisme. Alasannya, pluralisme dan relativisme merupakan paham yang akan merusak ajaran Islam yang suci karena adanya perjumpaan dan pembauran dengan berbagai konsep dan budaya lain yang dianggap kafir. Ketiga, Wahabi mengklaim dirinya sebagai pemegang otoritas yang sah untuk mengajarkan Islam sehingga kelompok-kelompok lain dalam Islam termasuk para ulama dianggap sesat karena terbuka pada konsep dan budaya luar.

Menurut Abou El-Fadl, cendekiawan Islam, kelompok puritan Islam adalah mereka yang secara konsisten dan sistematis tidak mengenal kompromi atau bersikap intoleran terhadap berbagai realitas pluralisme (Ihsan, 2014: 5). Pluralitas dianggap mencederai kesucian keyakinan mereka. Puritanisme Islam, lanjut El-Fadl, selalu berwatak intoleran, merasa superior, pengekangan terhadap perempuan, antirasionalisme, dan sangat literalis (Ihsan, 2014). Selain itu, kelompok puritanisme Islam selalu menggaungkan kepada umat Islam agar kembali ke bentuk ajaran Islam yang terjadi pada masa Nabi Muhammad S.A.W. Mereka menganggap rendah praktik kehidupan umat Islam masa kini karena terkontaminasi oleh berbagai realitas bobrok dalam masyarakat.

Pandangan ini menyebabkan kaum Wahabi melakukan berbagai aksi puritan dalam kehidupan masyarakat dan agama Islam. Kaum Wahabi menghancurkan makam dan situs-situs bersejarah Islam di Arab Saudi karena dianggap bersifat kultus semata. Kaum Wahabi juga menolak ziarah ke pemakaman para wali karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam, yakni meminta doa melalui para wali atau orang suci. Selain itu, mereka menolak tradisi keagamaan lokal seperti maulid Nabi atau berbagai ritual adat karena dipandang tidak memiliki dasar tekstual dalam Al-Quran. Lebih dari itu, mereka menetapkan aturan sosial yang ketat, seperti pemisahan gender, pembatasan hiburan, dan pengawasan cara berpakaian (DeLong-Bas, 2004: 13-35).

Dengan demikian, puritanisme agama dalam ideologi islamisme mengkonstruksi identitas tertutup karena mengutamakan pemurnian ajaran agama melalui penolakan terhadap praktik, tafsir, dan adat-istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang asli. Akibatnya, ideologi islamisme menciptakan identitas keagamaan secara eksklusif karena membedakan secara radikal Islam yang murni dan Islam yang tercemar. Karena itu, kelompok Islam moderat, kelompok Islam Sufi yang menggabungkan Islam dengan budaya setempat, serta kaum non-Islam dianggap sebagai “yang lain” dan “yang berbeda” serta menjadi ancaman terhadap kemurnian kemurnian Islam. Alhasil, puritanisme menyebabkan kelompok islamisme menganggap kelompok mereka sebagai kelompok Islam yang benar, sehingga menimbulkan eksklusivisme, sikap antikritik, penolakan terhadap dialog, dan praktik kekerasan terhadap kelompok lain.

GAGASAN MASYARAKAT TERBUKA KARL POPPER

Generasi Agung yang Mengutamakan Rasionalisme Kritis

Karl Popper (2013: 174-175) menyebut masyarakat terbuka sebagai generasi agung (*great generation*). Kehadiran dan keberadaan masyarakat terbuka merupakan pembalikan radikal terhadap tatanan kehidupan masyarakat tribal dan totalitarian yang irasional dan mistis-magis. Bagi Popper, identitas utama masyarakat terbuka sebagai generasi agung adalah keseluruhan aktivitas mereka dijiwai oleh rasionalitas. Popper menjelaskan masyarakat terbuka menaruh kepercayaan teguh pada aktivitas akal, kebebasan, dan persaudaraan antar sesama manusia.

Karl Popper merujuk pada pemikiran Sokrates tentang akal budi untuk menjelaskan keutamaan masyarakat terbuka yang bersandar pada rasionalitas. Bagi Sokrates, akal budi membuat hidup manusia lebih berarti (Bertens, 1983: 108). Popper menyatakan peran akal budi diejawantahkan dalam filsafat. Filsafat, demikian Popper, memiliki peranan penting dalam mewujudkan masyarakat terbuka yang rasional. Filsafat memberi kesadaran baru bagi masyarakat Yunani untuk keluar dari kebiasaan mempercayai mitos secara berlebihan menuju suatu paradigma mencari sebab yang bisa dijelaskan secara rasional tentang segala sesuatu. Karena itu, bagi Popper (2013: 180), keruntuhan kekuatan mitos menyebabkan munculnya rasionalitas sebagai kekuatan dan keyakinan baru dalam kehidupan masyarakat.

Popper memberikan pandangan baru tentang rasionalitas, yakni rasionalisme kritis. Rasionalisme kritis yang dimaksudkan oleh Popper ialah penggunaan akal budi atau pikiran yang jernih untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik yang bersifat sosial, politik, maupun ekonomi (Magge, 1973: 28). Menurut Popper (2002: 431), kekuatan terang akal budi atau pikiran yang jernih jauh melampaui kekuatan perasaan serta nafsu dan karena itu manusia akan menemukan dan mencapai kebenaran utama hanya melalui akal budi.

Popper kemudian menjelaskan rasionalisme kritis dalam korelasinya dengan sikap dan tingkah laku manusia. Dalam kaitannya dengan ini, rasionalisme kritis merupakan sikap kesediaan manusia untuk mendengarkan argumen-argumen kritis yang konstruktif dalam pengalaman hidupnya (Popper, 2013: 178). Keterbukaan pada argumen-argumen kritis membuat manusia keluar dari ketertutupan dirinya, keluar dari pemahamannya yang dangkal, dan keluar dari persepsinya yang mungkin keliru. Manusia tidak boleh mempertahankan apa yang telah dinyatakan sebagai kebenaran, karena akan muncul kebenaran baru di luar dirinya. Kebenaran baru muncul dari sikap yang kritis terhadap kebenaran lama. Popper berpandangan bahwa dalam setiap kebenaran ada celah kekeliruan dan kesesatan. Karena itu, kekeliruan dan kesesatan itu perlu dihilangkan sehingga muncul lagi kebenaran baru (Fauzan, 2002: 168).

Popper memberikan garis demarkasi yang jelas antara rasionalisme kritis dan rasionalisme tidak kritis yang disebutnya sebagai rasionalisme komprehensif. Rasionalisme kritis menegaskan bahwa pengetahuan manusia selalu terbatas dan selalu memiliki kemungkinan terhadap kesalahan, sehingga harus diuji secara terus-menerus melalui kritik dan dialog. Bagi Popper, teori, ideologi, dan keyakinan tidak selalu selalu mutlak benar. Akibatnya, rasionalitas bagi Popper tidak memiliki

kebenaran mutlak, sehingga selalu siap pada kritikan dan merevisi pandangan jika terbukti salah. Sebaliknya, rasionalisme komprehensif merupakan pandangan bahwa segala sesuatu mesti dibuktikan sepenuhnya oleh rasio sebelum diterima menjadi suatu kebenaran. Popper mengkritik pandangan ini karena bersifat kontradiktif. Prinsip yang menyatakan bahwa “segala sesuatu mesti dibenarkan secara rasional” dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan secara rasional. Akibatnya, rasionalisme komprehensif berkecenderungan terperangkap dalam dogmatisme intelektual karena meyakini akal manusia bisa mencapai kepastian absolut (Popper, 2013: 178).

Popper juga menegaskan bahwa demokrasi merupakan contoh nyata dalam menggunakan rasionalisme kritis dalam memecahkan sebuah masalah. Secara spesifik, Popper menyatakan bahwa cara demokrasi menjadi sarana efektif dalam pergantian pemerintah dan perbaikan kebijakan publik. Popper berpendapat bahwa masyarakat terbuka tidak selalu mencari pemimpin yang benar, tetapi mengupayakan sistem pemerintah yang terbuka pada kritikan dan perbaikan tanpa menggunakan kekerasan. Misalnya, ketika ada kebijakan ekonomi yang gagal dari pemerintah, masyarakat terbuka menyediakan ruang bagi pihak oposisi, kaum akademisi, masyarakat sipil, dan pers untuk mengkritik kebijakan tersebut melalui evaluasi rasional di ruang publik untuk mengganti kebijakan atau mengganti pemimpin dengan cara yang damai (Popper, 1966: 120-125). Karena itu, Popper menegaskan bahwa inilah praktik nyata rasionalisme kritis, yakni ketika suatu masalah sosial dipecahkan melalui konsep *trial and error*, kritik terbuka, koreksi berkelanjutan, dan bukannya melalui ideologi absolut maupun kekuasaan yang anti kritik (Popper, 1957: 64-67).

Dengan demikian, masyarakat terbuka merupakan kumpulan individu yang terbuka pada kritikan yang konstruktif, sebab sebagaimana rasio bertumbuh dalam kekritisannya sehingga bisa menghasilkan pikiran yang jernih, demikian pula setiap individu mesti terbuka pada kritikan agar menyadari kelemahan dan kekurangan yang ada pada mereka untuk berbenah diri (Popper, 2013: 179). Bagi Popper (2013: 180), ketiadaan keterbukaan terhadap kritikan menyebabkan manusia terjebak dalam pola hidup kaum tribal dan totalitarian yang tidak menginginkan perubahan.

Mengkonstruksi Identitas Terbuka

Karl Popper (2013: 168) menyatakan bahwa cikal-bakal konstruksi identitas terbuka ialah keterbukaan dan komunikasi dengan pihak lain. Hal ini diungkapkan Popper ketika ia menganalisis transformasi kehidupan masyarakat Yunani Kuno yang semula hidup dalam tatanan tribalisme dan totalitarianisme menuju masyarakat demokratis karena adanya keterbukaan mereka dengan peradaban lain melalui perdagangan jalur laut. Masyarakat Yunani Kuno menjalin komunikasi intens bukan hanya terkait penjualan dan pembelian barang, tetapi juga tentang beragam pengetahuan, budaya, politik, ekonomi, dan sosial dengan peradaban lain dalam jalur perdagangan laut. Hal ini menyebabkan masyarakat Yunani memperoleh banyak pengetahuan baru. Selain itu, kebebasan individu mendapat tempat utama dalam komunikasi tersebut. Mereka bebas berelasi dan berkomunikasi dengan pihak lain tanpa adanya tekanan dari pemimpin dan elite birokrasi Yunani sebagaimana yang lazim terjadi pada waktu itu (Popper, 2013: 168).

Keterbukaan masyarakat Yunani menyadarkan mereka akan kekurangan yang ada dalam tatanan pemerintahan mereka yang totaliter yang mengabaikan kebebasan individu dan pengekangan terhadap partisipasi dalam mengontrol dan mengkritisi kebijakan penguasa. Bagi Popper (2013), kesadaran seperti ini mendorong masyarakat Yunani Kuno dan juga masyarakat kontemporer untuk mentransformasi sistem pemerintahan yang totaliter menjadi sistem yang terbuka dan transparan.

Popper kemudian menjelaskan sistem pemerintahan ideal yang mengkonsolidasi identitas terbuka adalah demokrasi (Shearmur, 1996: 50). Pembentukan sistem demokrasi, demikian Popper, dicapai melalui diskursus antarmasyarakat tanpa menyertakan kekerasan. Hal ini diungkapkan oleh Shearmur seperti dalam kutipan berikut:

Popper is insistent on the importance of democratic government, which he argues we should understand in terms of ability of the population to change its government by means of vote, as opposed to force. And he argues the importance resorting to violence, unless it is against a tyranny which cannot be changed to a democratic from a government, other than by force (Shearmur, 1996: 50-51).

Popper beranggapan bahwa sistem demokrasi memfasilitasi keterbukaan dan kebebasan masyarakat untuk berkomunikasi, berkreasi, bekerja, dan berekspresi. Namun, kebebasan tersebut selalu berada di bawah koridor peraturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya adalah mengendalikan kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang kebablasan menyebabkan ketidakberaturan dan kepincangan sosial. Karena itu, bagi Popper, kebebasan dan keterbukaan dalam sistem demokrasi mesti dikendalikan agar tidak terjadi berbagai penyimpangan bernada destruktif (Shearmur, 1996: 51).

Sistem demokrasi mendukung terbentuknya identitas terbuka dengan menciptakan ruang bagi kebebasan berpendapat, kritik, dialog, dan kebebasan seluruh warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara tanpa membedakan agama, suku, ras, dan ideologi. Demokrasi mengkonsolidasi pengakuan akan pluralisme dan kesetaraan semua warga negara serta identitas masyarakat dibangun berdasarkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum yang sama. Karena itu, dalam pandangan Popper, demokrasi mendukung pembentukan identitas terbuka karena kritik terhadap kekuasaan dimungkinkan serta perubahan sosial ditempuh melalui cara-cara damai. Akibatnya, identitas tertutup yang eksklusif, antipluralis, dan dogmatis tidak mendapat ruang yang signifikan dalam demokrasi karena dapat mencegah munculnya kelompok yang memaksakan suatu ideologi sebagai kebenaran mutlak bagi seluruh masyarakat (Hardiman, 2011: 261-270).

Popper kemudian menggaungkan prinsip proteksionisme. Proteksionisme merupakan prinsip yang menegaskan perlindungan terhadap kebebasan individu. Selain itu, proteksionisme menggarisbawahi peran masyarakat untuk mengontrol kebebasan yang kebablasan. Bagi Popper, proteksionisme menjadi salah satu prinsip yang menopang keberadaan masyarakat terbuka (Shearmur, 1996: 52). Popper juga menegaskan prinsip proteksionisme berhubungan dengan tugas negara untuk melindungi individu dan kelompok lemah dari pihak yang berwenang dalam kekuasaan. Negara mesti menjalankan fungsi protektif melalui hukum untuk

menjamin hak-hak setiap warga negara serta membatasi kebebasan yang kebablasan karena kebebasan yang tidak dibatasi menyebabkan pihak yang kuat akan menindas pihak yang lemah. Di sisi lain, Popper menolak proteksionisme yang berciri otoritarian, yakni kontrol penuh negara terhadap masyarakat. Popper hanya mendukung penerapan “proteksionisme institusional”, yakni perlindungan negara melalui hukum dan terbuka pada kritikan yang konstruktif (Popper, 1966: 110-125).

Dengan demikian, konstruksi identitas terbuka berawal dari keterbukaan dengan pihak lain. Keterbukaan berimplikasi pada adanya komunikasi. Hasil dari komunikasi ialah pembaruan informasi yang berupa pengetahuan, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang lain. Pembaharuan informasi memunculkan kesadaran baru. Kesadaran bahwa apa yang terjadi pada kami rupanya berbeda dengan yang terjadi pada mereka. Kesadaran menggugah munculnya kekritisannya. Apa yang terjadi pada kami sebenarnya salah. Ia harus diubah. Kesadaran kritis tersebut kemudian dikonsolidasi dalam sistem demokrasi. Demokrasi memungkinkan kebebasan dan keterbukaan untuk menyuarakan aspirasi dan kritikan. Namun, kebebasan harus dikendalikan agar tidak kebablasan. Negara mengontrol kebebasan melalui hukum.

Pengakuan Kebenaran Relatif

Karl Popper secara tegas menolak prinsip kebenaran absolut. Baginya, kebenaran absolut tidak ada karena setiap kebenaran pada galibnya akan digantikan oleh kebenaran baru yang muncul kemudian. Prinsip ini berhubungan dengan penjelasan Popper dalam filsafat ilmu pengetahuannya yang tertera dalam teori falsifikasi. Falsifikasi secara harfiah berarti melihat melalui kesalahan. Artinya suatu teori tidak mungkin sepenuhnya bebas dari kesalahan. Karena itu, suatu teori selalu terbuka pada kebenaran baru. Kebenaran suatu teori terletak pada kenyataan bahwa teori tersebut mengandung kemungkinan untuk salah (Dua, 2009: 57). Dengan kata lain, pengetahuan harus dikritik dan terbuka pada kritikan agar mendekati kebenaran.

Berlandaskan pada teori falsifikasi, Popper berpendapat bahwa masyarakat terbuka merupakan masyarakat yang mengakui kebenaran relatif. Falsifikasi Popper menegaskan bahwa suatu teori ilmiah tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara penuh, tetapi hanya diuji melalui kritik yang kontinu dan berdasarkan pengalaman empiris. Jika suatu teori belum terbukti salah, maka kebenaran teori tersebut bersifat sementara. Karena itu, pengetahuan manusia selalu bersifat sementara, terbuka pada koreksi, dan dapat diganti oleh teori yang lebih baik (Bertens, 2002: 95-110). Pandangan ini menyebabkan munculnya pengakuan bahwa kebenaran yang dimiliki manusia selalu bersifat relatif, yang berarti tidak mutlak dan absolut. Namun, Popper tidak terjerumus ke dalam relativisme total karena ia percaya bahwa kritik rasional dan falsifikasi memungkinkan manusia bergerak semakin dekat pada kebenaran objektif, meskipun tidak bisa memilikinya secara sempurna (Popper, 1972: 265).

Bagi Popper, pengakuan akan kebenaran relatif memungkinkan masyarakat terbuka pada kritikan karena mereka selalu berada pada kemungkinan untuk salah. Kritikan dan penerimaan akan kritikan menyebabkan masyarakat mendekati kebenaran. Bagi Popper, masyarakat seperti ini berciri adaptif dan transformatif. Masyarakat akan mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru yang membawa kebenaran baru. Paradigma dan pola hidup mereka akan berubah dengan

menyesuaikan pada kebenaran baru yang muncul. Tentunya hal ini diseimbangkan dengan sikap kritis (Popper, 2013: 54).

Pandangan ini berimplikasi pada kehidupan masyarakat yang terbuka dan menerima perbedaan agama, suku, dan ras sebagai suatu keharusan. Hal ini terjadi karena semua agama, suku, dan ras tidak mempunyai kebenaran yang sempurna dan absolut. Manusia menyadari pemahaman dan keyakinan mereka bukan satu-satunya yang mutlak dan absolut. Karena itu, mereka terbuka pada dialog dan menerima perbedaan pandangan, keyakinan, dan budaya dengan sikap terbuka. Dengan demikian, kesadaran bahwa pengetahuan manusia selalu terbuka terhadap kritik mendorong sikap toleran dan dialogis, sehingga perbedaan tidak dilihat sebagai ancaman tetapi sebagai peluang untuk saling belajar dan memperbaiki pemahaman bersama.

Pengakuan terhadap kebenaran relatif melahirkan masyarakat yang plural, terbuka, dan menghargai kemajemukan. Masyarakat akan mudah menerima setiap kondisi pluralitas seperti suku, agama, dan ras. Mereka akan menghargai kepercayaan atau keyakinan setiap orang. Mereka beranggapan bahwa sesuatu yang melekat pada diri mereka dalam hal suku, agama, dan ras, selalu memiliki kemungkinan untuk keliru dan salah. Kemungkinan untuk keliru dan salah tersebut mungkin disempurnakan oleh kebenaran yang ada dalam pluralitas dan kemajemukan (Popper, 2002: 190).

Anti Utopianisme

Kehadiran dan keberadaan masyarakat terbuka merupakan antitesis bagi keberadaan masyarakat tertutup yang bersifat utopis. Hal ini tampak nyata dalam kajian dan kritik Karl Popper terhadap historisisme Plato, Hegel, dan Karl Marx yang baginya terjebak dalam utopianisme. Pertama, kajian dan kritikan terhadap utopianisme Plato (Popper, 2013: 83). Bagi Popper, utopianisme dalam pemikiran Plato termaktub dalam teori naturalismenya tentang pembentukan negara ideal. Plato menolak semua perubahan dalam bidang politik karena menciptakan kekacauan secara terus-menerus dalam masyarakat seperti yang terjadi di Athena, Yunani. Plato meyakini bahwa solusi yang diberikan untuk mengatasi kekacauan adalah pembentukan tatanan negara yang berciri tribal-patriarkat. Pada sistem ini, minoritas cerdas yang pandai mesti memerintah masyarakat yang dianggap kurang pandai. Menurut Popper (2013), pembentukan sistem kenegaraan tribal-patriarkat ala Plato menghadirkan sistem totaliter dan fasisme karena minoritas masyarakat cerdas akan memerintah mayoritas masyarakat bodoh secara sewenang-wenang. Minoritas cerdas akan menggunakan kecerdikan mereka untuk mengelabui dan membohongi mayoritas masyarakat bodoh. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan seperti ini tidak boleh ada.

Kedua, kajian dan kritik terhadap utopianisme Hegel (Popper, 2002: 274-290). Popper berpendapat bahwa pemikiran Hegel tentang Roh Absolut dan negara nasionalis terjebak dalam utopianisme. Alasannya ialah Hegel ingin mengonstruksi bentuk pemerintahan totaliter. Bagi Hegel, sebuah negara mesti merupakan kumpulan individu dari suatu ras unggul. Konsekuensinya, negara mesti menindak secara tegas keberadaan ras-ras lain melalui kekerasan dan bahkan pembunuhan. Bukti nyata paham utopianisme ini adalah kehadiran fasisme Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Nazi berusaha melenyapkan ras Yahudi untuk mentahtakan

kedigdayaan ras Arya di dunia. Bagi Popper, utopianisme ini hanya terbatas dalam pembunuhan ras Yahudi karena setelah peristiwa Holocaust dan Auschwitz, ras-ras lain masih tetap hidup aman di Jerman. Selain itu, bagi Popper, konsep Hegel ini secara terselubung ingin membentuk identitas tertutup yang ditandai oleh pengakuan akan keunggulan dan kedigdayaan suatu ras terhadap ras lain.

Ketiga, kajian dan kritikan terhadap pemikiran utopianisme Karl Marx (Popper, 2002: 274). Utopianisme Karl Marx, bagi Popper, ada dalam pemikiran materialisme historis. Pemikiran materialisme historis Marx menyatakan bahwa keseluruhan sejarah kehidupan manusia sebenarnya ditentukan oleh dimensi material atau ekonomi karena pemilik modal selalu menguasai serta mengeksploitasi kelas proletar. Marx ingin membentuk masyarakat tanpa kelas (Magnis-Suseno, 2003: 137). Karl Popper mengatakan pemikiran Marx ini terjebak dalam utopianisme karena analisis Marx tidak didasarkan pada penelitian objektif-ilmiah melainkan hanya pada deskripsi subjektif semata. Karena itu, bagi Popper (2002) pembentukan masyarakat tanpa kelas di masa mendatang hanya merupakan ramalan semata dan tidak akan pernah ada karena Marx tidak mempertimbangkan dinamika kehidupan masyarakat. Karl Popper juga melihat kenyataan pemerintah sosialis dan komunis Uni Soviet dan Republik Tiongkok yang mengejawantahkan teori Marx malah menghadirkan bentuk pemerintah totaliter yang menyengsarakan masyarakat.

Beranjak dari penjelasan di atas, Karl Popper menganggap utopianisme berbahaya karena utopianisme berusaha membangun dan mewujudkan masyarakat ideal yang didasarkan pada suatu ideologi yang dianggap memiliki kebenaran mutlak. Bagi Popper, ketika suatu kelompok telah menemukan suatu tatanan masyarakat ideal, mereka akan melegalkan kekuasaan untuk mewujudkan tatanan tersebut kepada seluruh masyarakat. Mereka akan menyingkirkan perbedaan pendapat, kritikan, dan kebebasan individu karena dianggap sebagai penghambat. Selain itu, Popper menilai bahwa utopianisme selalu melahirkan totalitarianisme karena perubahan sosial dilakukan secara revolusioner, seperti yang terjadi pada pembentukan masyarakat komunis dan sosialis pada masa Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam mencapai tujuan ideal, penguasa bebas menggunakan kekerasan, menindas oposisi, dan mengorbankan hak asasi manusia tanpa belas kasihan demi masa depan yang dianggap sempurna. Karena itu, Popper menegaskan bahwa masyarakat terbuka mesti dibangun melalui reformasi secara bertahap, kritik rasional yang terbuka, serta pengakuan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pengakuan bahwa tidak ada ideologi yang mempunyai kebenaran absolut tentang masa depan.

Anti Kolektivisme

Konsep anti kolektivisme Karl Popper didasarkan pada kajian dan kritik terhadap prinsip kolektivisme yang tertuang dalam pemikiran historisisme Plato, Hegel, dan Karl Marx (Popper, 291-301). Pertama, kritikan terhadap pemikiran kolektivisme Plato. Plato beranggapan bahwa keadilan merupakan kepemilikan terhadap keseluruhan negara yang didasarkan pada hubungan antar kelas atau golongan yang ada dalam negara. Golongan tersebut dibedakan menjadi golongan pertama yang terdiri atas para filsuf, golongan kedua prajurit, dan golongan ketiga terdiri atas para petani dan tukang. Golongan filsuf ditentukan untuk memimpin negara karena kebijaksanaan mereka. Akibatnya, semua keputusan yang ditetapkan

oleh golongan filsuf mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua masyarakat. Meski sering kali menyengsarakan masyarakat, keputusan dan kebijakan yang ada harus dilaksanakan tanpa ada ruang diskursus. Kebijakan dan keputusan tersebut diyakini berasal dari para dewa.

Kedua, kritiknya terhadap pemikiran kolektivisme Hegel. Hegel menyatakan bahwa setiap individu dalam negara mesti mematuhi negara secara absolut karena negara merupakan perwujudan roh absolut. Karena itu, negara dan keputusan yang dibuatnya tak pernah dipersalahkan karena menjadi representasi kebenaran absolut dari Roh Absolut. Akibatnya, pemikiran dan tindakan masyarakat dikekang oleh negara sehingga masyarakat tidak bisa mengeksplorasi kebebasan dengan merdeka.

Ketiga, kritikan terhadap pandangan kolektivisme Marx yang tertuang dalam pemikirannya tentang sosialisme. Teori sosialisme Marx menolak pengakuan kepemilikan pribadi dalam masyarakat. Sosialisme hanya mengakui kepemilikan bersama yang diatur oleh negara. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan menghadirkan masyarakat tanpa kelas. Namun bagi Popper, alih-alih bermaksud demikian, sosialisme akhirnya terjebak dalam dominasi negara yang berlebihan terhadap kehidupan masyarakat. Ini menyebabkan terbentuknya tatanan pemerintah otoriter. Akibatnya, masyarakat hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan dan bahkan berujung pada kematian tragis.

Berdasarkan tilikan di atas, Popper menolak prinsip kolektivisme karena mengekang kebebasan setiap individu untuk hidup bahagia dan sejahtera dengan cara mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bagi Popper, kolektivisme menciptakan tatanan masyarakat tertutup. Karena itu, konsep masyarakat terbuka Popper menekankan pentingnya pengakuan kebebasan individu tanpa adanya tekanan negara. Negara mengakui kebebasan individu asalkan kebebasannya sejalan dengan hukum, norma, dan nilai-nilai moral yang diakui bersama.

Masyarakat terbuka mengakui kebebasan individu melalui pengakuan kebebasan menyuarakan pendapat di media massa maupun media daring untuk mengkritisi kebijakan yang salah dan menyuarakan kebenaran. Selain itu, masyarakat terbuka menghargai kebebasan individu untuk berkreasi seturut minat dan bakatnya secara terbuka. Masyarakat terbuka juga menghargai kebebasan individu dalam memilih pekerjaan, menentukan pendidikan, menentukan pilihan politik dalam pemilu tanpa adanya represi dari pihak tertentu. Lebih dari itu, masyarakat terbuka menghargai preferensi setiap individu dalam beragama dan menganut ideologi tertentu asalkan tidak bertentangan dengan hukum.

Selain itu, beranjak dari penjelasan Popper di atas, prinsip kolektivisme ditolak karena kolektivisme menempatkan kepentingan negara, ras, dan ideologi tertentu di atas martabat dan kebebasan individu. Negara, ras, dan ideologi tertentu mengklaim mengetahui tujuan sejarah atau kebaikan bersama yang mesti ditaati dan diikuti oleh semua orang, sehingga individu tidak lagi dipandang sebagai pribadi bebas melainkan sebagai sarana bagi ideologi kolektif. Ketika individu tunduk pada ideologi kolektif tersebut, ruang kritik dan hak-hak pribadi dikorbankan demi kepentingan penguasa. Contoh nyata dari pandangan ini adalah Nazi Jerman. Ia lahir dari pandangan Hegel tentang roh absolut, seperti yang dijelaskan Popper di atas. Kemudian Nazi

berkembang menjadi kekuasaan fasis dan totaliter karena menginginkan pembentukan negara yang dikuasai dan terdiri dari ras Arya, sehingga ras lain khususnya Yahudi mesti dimusnahkan agar tidak menghambat pembentukannya.

GAGASAN MASYARAKAT TERBUKA KARL POPPER DAN KRITIK TERHADAP IDEOLOGI ISLAMISME

Gagasan Identitas Terbuka Masyarakat Terbuka dan Kritik terhadap Identitas Tertutup Ideologi Islamisme

Ada dua unsur utama pembentukan identitas terbuka masyarakat terbuka dalam pandangan Karl Popper untuk mengkritisi dan menghilangkan identitas tertutup ideologi islamisme. Kedua unsur tersebut adalah keterbukaan dan komunikasi atau diskursus. Popper (2013) menjelaskan bahwa keterbukaan masyarakat Yunani Kuno dalam perdagangan laut menjadi cikal bakal munculnya kesadaran akan keterpurukan sistem pemerintah totalitarian yang membelenggu mereka. Selain itu, keterbukaan masyarakat Jerman terhadap pemikiran humanis berhasil menentang pemikiran Hegel tentang negara absolut yang diimplementasikan oleh rezim Nazi. Kemudian keterbukaan negara-negara sosialis-komunis terhadap pengaruh luar berhasil menumbangkan tirani kekuasaan yang membelenggu masyarakat.

Pada aras yang sama, keterbukaan bukan tidak mungkin akan menghancurkan dan mengikis secara perlahan-lahan identitas tertutup ideologi islamisme. Dengan kata lain, keterbukaan terhadap pihak lain menjadi titik awal untuk meruntuhkan identitas tertutup ideologi islamisme. Namun, apakah mungkin ideologi islamisme terbuka terhadap pengaruh luar sementara mereka mengkonstruksi identitas tertutup secara total? Keterbukaan ideologi islamisme pada tahap awal terjadi melalui pertemuan antara kaum islamis radikal dengan sesama umat Islam yang bersikap moderat. Pertemuan tersebut, misalnya, terjadi ketika mereka melakukan umrah di Mekkah dan Madinah. Di sana, kaum islamis radikal dengan ideologi islamisme berjumpa dengan umat Islam moderat dengan ideologi Islam moderat. Selain itu, ruang keterbukaan tercipta ketika kaum islamis radikal menyusup ideologi islamisme melalui pengajian di masjid-masjid, media sosial, dakwah kampus, dan pertemuan personal.

Pada momen-momen seperti itulah, ada ruang untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan kaum islamis radikal. Saat melakukan umrah, kaum islamis radikal biasanya berusaha mengindoktrinasi ideologi islamisme kepada umat Islam yang lain. Namun jamaah haji yang mempunyai pemahaman akan spiritualitas agama Islam yang benar membuka ruang diskusi dengan mereka. Inti diskusi para haji ialah Islam seyogianya mengajarkan perdamaian entah dengan sesama Islam maupun dengan umat agama lain.

Dalam situasi seperti itu, jamaah haji dan umrah mempunyai motivasi dan semangat lebih untuk bersaksi dan berdiskusi dengan kaum islamis radikal. Mereka berusaha dengan keras mengembalikan kaum islamis radikal ke ajaran Islam yang benar. Hal ini terjadi karena pada saat umrah, mereka memosisikan diri sebagai utusan nabi. Ajaran Islam menyatakan ada ganjaran istimewa yang mereka terima jika berhasilewartakan Islam yang benar kepada sesama umat Islam yang telah menyimpang (Ramadan, 2002: 30). Hal ini selaras dengan ajaran Al-Quran yang

menekankan tiga aspek karakter kenabian umat Islam, yakni pertama, seorang pewarta atau rasul diutus kepada semua umat manusia untuk memberi peringatan akan keberadaan Allah; kedua, kesadaran akan kelemahan diri sendiri dan sesama manusia serta usaha membimbing diri dan umat Islam lain kepada Allah; ketiga, sebagai teladan dalam perilaku melalui implementasi moral yang baik (*uswah hasanah*) (Ramadan, 2002: 49-50). Para jamaah haji juga menjelaskan kepada mereka bahwa Al-Quran menegaskan umat Islam mesti menghormati dan menghargai perkawinan, perdagangan, kebudayaan, dan keyakinan agama lain dalam relasi sosial (muamalat) (Ramadan, 2002: 50).

Komunikasi atau diskursus dalam jejaring media sosial memainkan peranan penting untuk berkomunikasi dengan kaum islamis radikal. Media sosial biasanya digunakan untuk menyebarkan ideologi islamisme dan menjaring anggota. Karena itu, umat Islam moderat dan segenap elemen masyarakat menggunakan media sosial untuk menangkal, meresistensi, dan membangun dialog yang intens dengan kaum islamis radikal. Kegiatan ini menjadi bagian dari dakwah virtual (Zaini, 2018: 111). Umat Islam moderat dan penggiat toleransi mengunggah postingan video bertajuk indahny keberagaman masyarakat plural di media sosial seperti *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*. Pengalaman keberhasilan dalam postingan seperti ini pernah dialami oleh A. Helmy Faisal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014). Ia pernah mengunggah sebuah video grafis yang bertajuk "Makna Perbedaan". Dalam waktu singkat, video tersebut menyebar dengan cepat dan dibagikan oleh ratusan ribu pengguna media sosial (Zaini, 2018: 111).

Salah satu sarana komunikasi yang baik juga ialah dakwah kampus. Para rektor dan dosen mengajarkan Islam moderat kepada para mahasiswa. Kegiatan ini penting dilakukan karena kaum islamis radikal sering kali menggunakan medium kampus untuk menyebarkan ideologi islamisme. Karena itu, para rektor, dekan, dan dosen perlu mengomunikasikan bahaya ideologi islamisme kepada mahasiswa sebagai upaya mencegah penyebaran ideologi islamisme yang bisa memecah belah kesatuan bangsa.

Selain itu, diskursus yang bercorak teologis juga penting untuk dilakukan. Diskursus ini melibatkan para pemikir dan teolog Islam dengan kaum islamis radikal (Daven, 2016: 290). Diskursus bernuansa teologis tersebut membuka ruang bagi para pemikir dan teolog Islam untuk mengajarkan kebenaran utama dalam agama Islam kepada para penganut ideologi islamisme. Tujuan utama diskursus tersebut adalah mengonstruksi sikap saling pengertian antara para pemikir dan teolog Islam dengan para islamis radikal untuk mencapai suatu kesepakatan bersama tentang klaim kebenaran dalam Islam (Daven, 2016: 290). Contoh nyata dari diskursus ini adalah kaum ulama dan Muslim moderat membuka ruang dialog dengan kelompok islamisme saat pengajian dan dakwah yang dilakukan di masjid, musola, dan pesantren. Mereka memberikan kesempatan kepada kelompok islamisme untuk membeberkan pandangan mereka, kemudian pandangan tersebut dimurnikan dengan memberikan penjelasan yang selaras dengan ajaran Al-Quran tanpa membuat mereka tersinggung. Para ulama dan teolog Islam mesti memberikan dakwah secara terus-menerus saat pengajian mengenai ajaran Al-Quran dan perintah Nabi Muhammad yang benar

kepada kelompok islamisme agar tafsiran mereka yang keliru bisa diluruskan, sehingga mereka tidak lagi terjerumus dalam penafsiran yang sesat.

Gagasan Pengakuan Kebenaran Relatif Masyarakat Terbuka dan Kritik terhadap Klaim Kebenaran Absolut Ideologi Islamisme

Kebenaran absolut yang diyakini, diakui, dan dipegang teguh ideologi islamisme sebenarnya bersifat nihil jika ditinjau dari pemikiran Karl Popper tentang kebenaran relatif. Ada beberapa alasan yang menopang pernyataan ini. Pertama, kebenaran selalu bersifat hipotesis. Hal ini terjadi karena dalam kurun waktu tertentu, suatu kebenaran bisa berubah. Perubahan ini terjadi karena konteks dan dinamika kehidupan masyarakat terus berubah. Begitu pun halnya dengan ideologi islamisme. Kebenaran yang diakui ideologi islamisme bisa berubah karena akan muncul berbagai ideologi tandingan. Selain itu, kebenaran yang diyakini ideologi islamisme dalam beberapa dekade ke depan bisa hilang karena perubahan paradigma dan pola laku umat Islam yang lebih adaptif dengan modernitas peradaban Barat. Umat Islam juga akan mengkritisi ideologi islamisme karena perubahan cara pandang mereka tentang kebenaran agama Islam. Sikap kritis ini muncul karena pembauran umat Islam dengan berbagai nilai humanisme yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini.

Kedua, kebenaran absolut yang diakui dan diyakini ideologi islamisme tidak memiliki tempat dalam tatanan masyarakat plural atau majemuk. Masing-masing individu dan komunitas dalam masyarakat plural memiliki dan meyakini kebenaran masing-masing. Kebenaran tersebut menjadi basis justifikasi dalam bertindak dan berperilaku. Karena itu, kelompok islamis radikal tidak bisa memaksakan penerapan ideologi islamisme untuk diimplementasikan dalam kehidupan bersama karena berbenturan dengan berbagai kebenaran yang ada dalam masyarakat plural. Secara spesifik, ideologi islamisme tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan oleh umat agama lain karena masing-masing agama mempunyai keyakinan tersendiri tentang kebenaran. Misalnya, agama Katolik mengakui Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran atau agama Budha mengakui Sidharta Gautama sebagai teladan kebenaran. Begitu pun halnya dengan agama-agama lain.

Ketiga, pengakuan kebenaran absolut dalam ideologi islamisme merupakan pengakuan akan kebenaran semu belaka. Alasannya, para penganut ideologi islamisme tidak pernah memfalsifikasi ideologi islamisme dengan cara mencari kekeliruan, kesesatan, dan kesalahan dalam ideologi tersebut guna menemukan kebenaran paling hakiki di dalamnya. Impaknya, kekeliruan dan kesesatan terus bercokol dalam ideologi islamisme. Selain itu, kebenaran absolut dalam ideologi islamisme menjadi sebuah kebenaran hampa yang nirmakna. Ini terjadi karena ideologi islamisme mengabaikan sikap dan cara berpikir rasionalisme kritis. Cara berpikir seperti ini penting dalam ideologi islamisme guna menemukan kebenaran baru atau menemukan kesalahan dalam ideologi islamisme. Alhasil, ideologi islamisme terus bertahan dalam paradigma yang miris yang bertentangan dengan kebenaran umum atau kebaikan bersama dalam masyarakat plural. Misalnya, kelompok Hizbut Tahir Indonesia menolak Pancasila sebagai ideologi negara, sistem demokrasi, dan pluralisme karena bagi mereka bertentangan dengan syariat Islam. Hizbut Tahir Indonesia memperjuangkan pendirian negara berbentuk khilafah yang didasarkan pada syariat Islam.

Selain itu, pengakuan akan kebenaran absolut dalam islamisme dianggap sebagai kebenaran semu karena yang dipandang absolut adalah tafsiran mereka terhadap wahyu Ilahi, bukan wahyu itu sendiri. Kelompok islamisme menganggap bahwa interpretasi ideologis mereka sesuai dengan kehendak Allah yang absolut. Namun, pada galibnya penafsiran terhadap agama selalu mengakomodasi unsur historis, budaya, dan subjektivitas manusia yang terbatas. Sementara itu, Karl Popper beranggapan bahwa setiap kebenaran selalu terbuka pada kritikan dan mempunyai kemungkinan untuk salah. Ketika kelompok islamisme mengklaim mempunyai kebenaran absolut, kebenaran tersebut menjadi semu karena tidak terbuka pada kritikan dan pengujian yang rasional, melainkan dibangun atas keyakinan ideologis mereka sendiri. Karena itu, persoalannya terletak pada interpretasi kelompok islamisme yang diidentikkan sempurna dengan kebenaran Tuhan, bukannya keyakinan religius dalam Islam.

Gagasan Antiutopianisme Masyarakat Terbuka dan Kritik terhadap Unsur Utopianisme Ideologi Islamisme

Ada tiga bagian utama gagasan anti utopianisme masyarakat terbuka Karl Popper dalam mengkritisi unsur utopianisme ideologi islamisme. Pertama, konstruksi bentuk pemerintah khilafah dalam pemikiran ideologi islamisme merupakan suatu keniscayaan. Para penganut ideologi islamisme memprediksi bentuk negara khilafah yang mereka canangkan akan terbentuk. Mereka tidak mempertimbangkan bentuk pemerintahan demokrasi yang merepresentasi tatanan pemerintahan peradaban Barat menjadi bentuk pemerintah yang diakui dan diterapkan oleh hampir semua negara di dunia. Hal ini diperparah fakta bahwa negara-negara Arab sebagai basis utama keberadaan dan penyebaran ideologi islamisme telah mempraktikkan politik dengan pintu terbuka yang biasa disebut gerakan *Arab Spring*. *Arab Spring* bertujuan untuk menggantikan tatanan otoriter dan totaliter dengan sistem demokrasi di hampir semua negara jazirah Arab (Umar dkk, 2014: 1). Karena itu, pendirian negara khilafah tidak mendapat tempat dalam pola pikir masyarakat modern. Ia sulit diimplementasikan pada tataran praktis.

Kedua, Karl Popper secara tidak langsung mengkritik ideologi islamisme karena melegalkan kekerasan dan pembunuhan. Hal ini terjadi karena Popper mengutuk konstruksi ideologi utopis yang melegalkan segala cara untuk mewujudkannya. Baginya, ideologi seperti ini bersifat antihumanis. Karena itu, ideologi islamisme juga bersifat antihumanisme. Sementara itu, humanisme merupakan unsur utama yang diakui masyarakat terbuka. Selain itu, para penganut ideologi islamisme menyertakan unsur pemaksaan agar ideologi islamisme diterima oleh masyarakat. Bagi Popper, penggunaan unsur pemaksaan dalam mewujudkan suatu ideologi atau pembentukan suatu negara merupakan ciri khas masyarakat tribal. Dengan demikian, bentuk negara khilafah bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dalam masyarakat terbuka. Nilai-nilai tersebut adalah keterbukaan, diskursus, dan anti kekerasan.

Ketiga, pembentukan negara khilafah dalam ideologi islamisme merupakan keinginan untuk menghadirkan kembali tatanan totaliter dan otoriter yang dipraktikkan oleh masyarakat tribalis serta rezim-rezim fasis yang dikritik Popper. Unsur otoritarianisme dalam ideologi islamisme ialah pembentukan komunitas homogen yang terdiri atas penganut ideologi islamisme saja. Dengan demikian, para

pemimpin akan bertindak sewenang-wenang dalam memerintah karena tak ada pihak oposisi yang mengontrol. Pembentukan komunitas homogen yang dicita-citakan ideologi islamisme menafikkan fakta pluralitas atau kemajemukan dalam masyarakat. Karena itu, pembentukan negara khilafah sulit terealisasi karena bertentangan dengan fakta pluralitas yang diakui oleh masyarakat modern.

Di sisi lain, pembentukan negara khilafah cenderung menghadirkan kembali tatanan otoriter dan totaliter karena menempatkan satu ideologi (ideologi islamisme) dan satu tafsir tunggal terhadap agama Islam sebagai kebenaran utama dalam kehidupan bernegara. Pada galibnya, model ini tidak mengakui kedaulatan rakyat, karena hanya mengakui kedaulatan Tuhan seturut interpretasi mereka. Karena itu, perbedaan pandangan, pluralisme, dan ruang dialog ditolak karena menjadi ancaman bagi kesatuan ideologis yang mereka tafsirkan. Selain itu, ideologi islamisme memproyeksikan sistem khilafah sebagai sebuah sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini mengakibatkan tidak ada pemisahan yang jelas antara otoritas agama dan kekuasaan politik, sehingga negara akan menjalankan kekuasaan atas nama kehendak Tuhan dan mengontrol masyarakat sesuai kehendak Tuhan yang ditafsirkan tersebut. Dengan demikian, kondisi ini identik dengan sistem totaliter karena hanya mengakui adanya satu kebenaran tunggal, penolakan terhadap oposisi, menerima satu ideologi saja, serta penolakan terhadap dialog dan diskursus publik.

Salah satu contoh nyata dari pergerakan ideologi islamisme seperti ini adalah kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Indonesia yang berkeinginan untuk membentuk negara khilafah dengan hukum Allah yang mereka tafsir sebagai kedaulatan tertinggi. Mereka menolak demokrasi dan pluralisme karena bertentangan dengan hukum Allah. Akibatnya, mereka tidak membuka ruang bagi diskursus rasional dengan pihak lain, termasuk dengan sesama umat Muslim yang bertolak belakang dengan mereka. ISIS melegalkan kekerasan dan pembunuhan terhadap kelompok lain yang berbeda ideologi politik, apalagi kelompok yang resisten dengan pergerakan mereka. Bagi ISIS, kelompok lain tersebut menjadi bagian dari kelompok kafir. Karena itu, mereka harus dimusnahkan agar kedaulatan hukum Allah yang mereka tafsirkan ditegakkan dan menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, dalam perspektif Popper, model ideologi dan pergerakan seperti ini sangat bertentangan dengan masyarakat terbuka karena membatasi dan menutup total ruang dialog serta ruang kritik atau koreksi terhadap kekuasaan. Ketika kekuasaan antikritik dan antidialog, maka kekuasaan tersebut akan berubah menjadi otoritarian. Oleh karena itu, ideologi islamisme yang ingin mewujudkan negara khilafah dipandang sangat berbahaya karena mengkonstruksi masyarakat tertutup yang antipluralis dan demokrasi serta menciptakan tatanan pemerintah yang totaliter dan otoriter.

Gagasan Kebebasan Individu Masyarakat Terbuka dan Kritik terhadap Unsur Kolektivisme Ideologi Islamisme

Ada dua kajian dan kritikan masyarakat terbuka terhadap unsur kolektivisme ideologi islamisme. Pertama, keharusan pemberlakuan syariat Islam mengekang kebebasan setiap individu untuk mengekspresikan dirinya dalam kehidupan publik. Setiap individu dalam proyek ideologi islamisme tidak memiliki kebebasan untuk

berelasi dengan kelompok atau masyarakat lain karena akan berdampak buruk bagi ketahanan ideologi islamisme. Kebebasan individu dalam menentukan pilihan politik juga dibatasi secara total. Ideologi islamisme berkeyakinan hanya ada satu sistem politik yang benar, yakni kedaulatan Allah. Di sisi lain, kematian menjadi konsekuensi tragis bagi individu yang menentang atau meresistensi syariat Islam. Mereka dianggap melanggar kesucian hukum Allah dalam syariat. Akibatnya, mereka hanya menerima dan melaksanakan syariat Islam tanpa bersikap kritis terhadapnya.

Kedua, pemikiran ideologis islamisme mengabsolutkan politik sebagai perihal benar dan salah. Tatanan politik yang didasarkan pada syariat Islam dianggap sebagai politik yang benar. Sementara itu, tatanan politik lain dianggap salah. Impaknya, syariat Islam mesti menjadi tatanan politik yang dijalankan oleh para penganut ideologi islamisme. Secara tidak langsung, mereka mengekang kebebasan individu untuk memilih dan menentukan tatanan politik ideal yang sesuai dengan kemauan setiap individu. Karena itu, politik dalam ideologi islamisme merupakan *meta-politik* yang berarti politik yang didasarkan pada klaim kebenaran absolut sehingga dengan sesuka hati menentukan hukum mana yang mesti ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan bersama (Daven, 2016: 299). Akibatnya, ideologi islamisme melihat politik sebagai sesuatu yang sakral karena didasarkan pada kedaulatan Allah. Padahal, pada galibnya politik merupakan sesuatu yang bersifat profan.

Dengan demikian, pemikiran ideologis islamisme mengidentikkan politik sebagai persoalan benar dan salah karena menjadi bagian dari implementasi kedaulatan dan kehendak Tuhan, bukan sebagai urusan tata kelola masyarakat. Akibatnya, kekuasaan diabsolutkan berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat Islam yang ditafsirkan oleh kelompok islamisme. Politik dipandang sebagai arena pertarungan antara yang benar dan yang salah, antara Islam dan kelompok kafir, sehingga politik bukan lagi ruang dialog dan diskursus publik yang kompromistis. Dampak lanjutannya ialah ketika ideologi islamisme dipandang mewakili kebenaran Tuhan yang absolut, maka lawan politik dianggap sebagai pihak yang mesti dihancurkan dan dimusnahkan karena menentang kehendak Allah yang absolut. Dalam pandangan Popper, pandangan seperti ini berimplikasi pada dogmatisme politik karena tafsiran suatu ideologi dianggap sebagai sesuatu yang final dan absolut.

Contoh nyata penerapan ideologi islamisme ini di Indonesia adalah momentum pilkada DKI Jakarta 2017. Sebagian besar kelompok islamisme menggunakan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran untuk mendiferensiasi masyarakat ke dalam kelompok pembela Islam dan musuh Islam. Mereka menarasikan bahwa memilih pemimpin tertentu merupakan kewajiban agama, sedangkan mendukung dan memilih pemimpin lain yang berbeda agama dikategorikan melawan Islam dan mendukung pemimpin kafir. Dalam hal ini, politik dianggap sebagai pertarungan religius antara memilih pemimpin yang dianggap benar menurut tafsiran religius mereka dengan memilih pemimpin yang salah dalam tafsiran religius yang keliru. Karena itu, kenyataan ini mengindikasikan bahwa politik telah diabsolutkan menjadi persoalan iman dan kebenaran mutlak, bukannya ruang kebebasan publik dalam menyuarakan kebebasan preferensi politiknya.

PENUTUP

Beberapa pemikiran dalam ideologi islamisme seperti klaim kebenaran absolut, polarisasi masyarakat dalam skema kawan-lawan dan benar-salah, konstruksi identitas tertutup, prinsip utopianisme dan kolektivisme menjadi marwah pergerakan kaum islamisme radikal. Pemikiran ideologis ini berseberangan dengan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran umum dalam masyarakat. Secara tak langsung, prinsip-prinsip ini berusaha membentuk dan menghadirkan tatanan totalitarianisme dan otoritarianisme karena bersifat antipluralisme. Ideologi islamisme juga bersifat antihumanisme. Manusia atau individu-individu yang berseberangan dengan mereka harus disingkirkan karena dianggap kafir.

Gagasan masyarakat terbuka Karl Popper merupakan antitesis yang baik untuk mengkritisi ideologi islamisme. Prinsip-prinsip masyarakat terbuka Karl Popper seperti penggunaan rasionalisme kritis, konstruksi identitas terbuka, pengakuan kebenaran relatif, antiutopianisme dan antikolektivisme menyediakan landasan berpikir yang efektif dalam mengkritisi ideologi islamisme yang bercorak deviatif. Selain itu, gagasan masyarakat terbuka Popper memunculkan sikap kritis masyarakat terhadap ideologi islamisme. Hal ini penting agar penyebaran ideologi islamisme mandek. Dengan demikian, ada harapan bahwa ideologi ini pasti akan hilang ditelan waktu. Ia tidak boleh mengganggu tatanan masyarakat plural yang sedang baik-baik saja. Pluralisme atau kemajemukan itu anugerah. Ia harus disyukuri, bukannya dilenyapkan. Ia disyukuri karena menjadi sumber kekayaan sosial, budaya, dan pengetahuan serta mencegah dominasi suatu kelompok dan ideologi tertentu yang bisa melahirkan otoritarianisme. Dalam perspektif Popper, pluralisme menjadi dasar terbentuknya masyarakat terbuka yang terbuka pada kritik, dialog, dan kebebasan individu, sekaligus menumbuhkan sikap toleransi, kritis, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Karena itu, penyebaran ideologi islamisme mesti dicegah dengan memperkuat pendidikan kritis, literasi digital, moderasi beragama, dialog lintas kelompok, penegakan hukum yang adil, serta menciptakan keadilan sosial untuk mencegah akar radikalisme. Dalam perspektif Popper, langkah-langkah ini diambil untuk mempertahankan masyarakat terbuka yang menjunjung kebebasan, dialog, kritik, dan pluralisme serta mencegah perkembangan ideologi tertentu yang membatasi dan menutup ruang dialog dan pengakuan akan pluralisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Rashad. (2004). Hizb ut-Tahir. *Institute for Strategic Dialogue*. <https://www.isdglobal.org/isd-explainer/hizb-ut-tahir/>?. Diakses pada 10 Mei 2026.
- Armstrong, Karen. (2002). *Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*. Penerj. Satrio Wahono. Jakarta: Serambi.
- Bertens, K. (1983). *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (2002). *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Daven, Mathias. (2013). Agama dan Politik: Hubungan yang Ambivalen Dialog Versus “perbenturan Peradaban”? *Jurnal Ledalero* 12(2), 209.
- Daven, Mathias. (2016). Fundamentalisme Agama sebagai Tantangan Bagi Negara. *Jurnal Ledalero* 15(2), 299.
- Daven, Mathias. “Politik Atas Nama Allah”. Dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger (Ed.). (2019). *Hidup: Sebuah Pertanyaan, Kenangan Lima Puluh Tahun STFK Ledalero*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- DeLong-Bas, Natana J. (2004). *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad*. New York: Oxford University Press.
- Dua, Mikhael. (2009). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Farida, Umma. (2015). Islam Pribumi dan Islam Puritan: Ikhtiar Menemukan Wajah Islam Indonesia Berdasarkan Proses Dialektika Pemeluknya dengan Tradisi Lokal. *Jurnal Fikrah* 3(1), 149.
- Hardiman, F. Budi. (2008). *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. (2011). *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Ihsan, Sofia. (2006). Terorisme, Puritanisme, dan Negara. *Jurnal Review Politik* 4(2), 5.
- Iqbal, Muhamad dan H. Amin Husein Nasution. (2015). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Kasdi, Abdurrahman. (2002). Fundamentalisme Timur Tengah: Akar, Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama. *Jurnal Tashwirul Afkar* 13(1), 21.
- Magee, Bryan. (1973). *Popper*. London: Fontana.
- Magnis-Suseno, Franz. (1999). *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Popper, Karl. (1966). *The Open Society and Its Enemies*. Vol. 1. London: Routledge.
- Popper, Karl. (1972). *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*. Oxford: Clarendon Press.
- Popper, Karl. (2002). *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*. Penerj. Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Popper, Karl. (2002). *The Logic of Scientific Discovery*. London: Routledge.
- Popper, Karl. (2013). *The Open Society and Its Enemies*. New Jersey: Princeton University Press.
- Priyono, A. E. (2019). *Masa Depan Islam Politik dan Islamisme di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Embun Kalimasada.
- Qutb, Sayyid. (2019). *Fi Dzilal Al-Quran*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Qutb, Sayyid. (2001). *Petunjuk Sepanjang Jalan*. Penerj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Media Da’wah.
- Ramadan, Tariq. (2002). *Teologi Islam-Barat*. Penerj. Abdullah. Bandung: Mizan.

- Rohmanu, Abu. (2015). *Jihad dan Benturan Peradaban, Identitas Postkolonial Khaled Medha Abou El Fadl*. Yogyakarta: Q-Media.
- Roy, Oliver. (2002). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press.
- Shearmur, Jeremy. (1996). *The Political Thought of Karl Popper*. London: Routledge.
- Smith, Donald Eugene. (1985). *Agama dan Modernisasi Politik*. Penerj. Machun Husein. Jakarta: Rajawali.
- Tibi, Bassam. (2001). *Islam Between Cultures and Politics*. New York: Palgrave.
- Tibi, Bassam. (2012). *Islamism and Islam*. New Heaven: Yale University Press.
- Tule, Philipus. (2008). *Mengenal dan Mencintai Muslim dan Muslimat*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. (2014). Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JSP) UGM* 18(2), 1.
- Wahid, Abdurrahman. (2009). *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Zaini, A. Helmy Faishal. (2018). *Nasionalisme Kaum Sarungan*. Jakarta: Penerbit Kompas.